



Judul : Mitigasi Dampak Negatif : Proyek Kereta Cepat Kudu Tebar Manfaat
Tanggal : Selasa, 22 Maret 2022
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Mitigasi Dampak Negatif Proyek Kereta Cepat Kudu Tebar Manfaat

ANGGOTA Komisi V DPR Muhammad Aras menyoroti pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Pembangunan infrastruktur nasional ini diharapkan membawa dampak positif tak hanya bagi penumpang, juga untuk warga sekitar perlintasan kereta cepat ini.

“Dampak dari seluruh area rel Kereta Cepat Jakarta-Bandung harus dimitigasi terkait aspek negatif-positif masyarakat yang ada di sekitarnya,” saran Aras dalam keterangannya, kemarin.

Hal ini, kata Aras, perlu dilakukan karena mereka sangat terganggu dengan hadirnya kereta cepat ini. Harus tetap ada upaya dari Pemerintah untuk mengantisipasi jangan sampai di tempat lain mendapat dampak positif, sementara di warga di sekitar rel mendapatkan dampak negatif.

“Yang kita harapkan, ekonomi berdampak kepada seluruh masyarakat, baik yang antar Jakarta-Bandung maupun sepanjang rel yang dilewatinya,” kata politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.

Untuk itu, lanjutnya, Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) perlu melakukan pendekatan dengan masyarakat terdampak pembangunan infrastruktur proyek nasional ini. Apalagi manfaat kereta cepat ini, jika diperhatikan lebih menyasar pada kalangan menengah ke atas.

Aras mempertanyakan manfaat kereta cepat ini untuk pertumbuhan ekonomi. “Apakah ini mampu untuk memberikan dampak ekonomi positif kepada masyarakat secara keseluruhan atau malah justru sebaliknya,” tanya Aras.

Tidak hanya itu, Aras juga mempertanyakan nilai ekonomi dari pembangunan Kereta Cepat ini.

“Apakah ini betul-betul bisa dimanfaatkan atau meningkatkan nilai ekonomi atau tidak? Ini masih menjadi kajian dari Kementerian Perhubungan,” kata legislator asal dapil Sulawesi Selatan II itu.

Sementara, Anggota Komisi V DPR Neng Eem mempertanyakan skema pembiayaan proyek strategis nasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

Semula pembiayaan proyek ini berasal dari Chinese Bank, namun dalam perjalanannya Pemerintah memberikan Penyerahan Modal Negara (PMN) melalui konsorsium BUMN. Ditambah lagi belum ada perubahan konsesi setelah pemerintah memberikan PMN di proyek infrastruktur nasional ini.

“(Proyek) yang asalnya itu dibiayai dari Chinese Bank ternyata ada kenaikan (anggaran) Rp 27 triliun dari Pemerintah, terus ditambah lagi dengan PMN dari BUMN,” kata Neng Eem dalam keterangannya, kemarin. ■ TIF